



PEMERINTAH  
KABUPATEN GRESIK

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025



**BADAN PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK**

## **KATA PENGANTAR**


Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, khususnya dalam mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2025. Dengan memperhatikan situasi dan perkembangan keadaan yang terjadi selama periode berjalan Tahun Anggaran 2025, Perubahan Renja Tahun 2025 memuat evaluasi terhadap capaian tujuan dan sasaran, serta perumusan perubahan kerangka kebijakan dan pendanaan, untuk mendukung optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025, yang disusun secara terukur dan sistematis sesuai prinsip dan tata cara Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Perubahan Renja Tahun 2025 terintegrasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan menjadi dasar dalam pengalokasian sumber daya yang dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Sehingga dalam pelaksanaannya,

diharapkan Perubahan Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat menjadi manfaat bagi lembaga dan kepentingan masyarakat demi tercapainya prioritas pembangunan melalui proses perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien.

Gresik, Juli 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN GRESIK



ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.  
NIP 197204111991011001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR RABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN .....</b>	<b>11</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I tahun 2025.....	11
2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025 .....	2
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...</b>	<b>21</b>
3.1 Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 .....	21
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>32</b>

## DAFTAR TABEL

**Tabel 2.1.** Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s.d. Triwulan I Tahun Anggaran 2025 .....13

**Tabel 3.1.** Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 .....22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 merupakan bagian dalam satu kesatuan siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja PD disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk mendukung ketercapaian target sasaran Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, dan target kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan potensi sisa saldo anggaran belanja tahun berjalan dapat dioptimalisasi untuk mendukung ketercapaian target pembangunan agar lebih responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat dan tantangan pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut BPPKAD Kabupaten Gresik merupakan Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya memiliki tanggung jawab dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik khususnya dalam menunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan.

Komitmen BPPKAD Kabupaten Gresik dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah diukur melalui Indikator sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan indikator:
  - a. Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai dengan ketentuan
  - b. Persentase data aset yang akurat
2. Meningkatnya Pendapatan Daerah, dengan indikator pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah.

Penjabaran strategi dan arah kebijakan BPPKAD Kabupaten Gresik dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Gresik yang ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi sesuai dinamika perkembangan Daerah.

Dengan adanya situasi dan dinamika ekonomi yang tidak sesuai asumsi pada awal tahun perencanaan Tahun Anggaran 2025, maka BPPKAD Gresik perlu melakukan penyesuaian dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Perubahan Renja BPPKAD Gresik Tahun 2025 perlu disusun secara sistematis ke dalam kelompok belanja program dan kegiatan yang lebih terdefinisi dan terukur melalui penyesuaian arah kebijakan dan kerangka pendanaan dengan adanya evaluasi terhadap target dan indikator kinerja, agar Perubahan Renja BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat menjadi dasar yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan khususnya dalam penyusunan Perubahan KUA - PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)
21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan

- Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor Seri E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
43. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
44. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
45. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.
46. Surat Edaran Bupati Gresik Nomor 050/494/437.71/2025 Tentang Perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPPKAD Kabupaten Gresik pada Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Adapun Tujuan dari penyusunan Renja ini adalah :

1. Menjadi landasan penyusunan kebijakan operasional bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025.
2. Menjadi bahan pendukung dalam tahapan penyusunan Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2025.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja BPPKAD Kabupaten Gresik, proses penyusunan Perubahan Renja BPPKAD Kabupaten Gresik, keterkaitan antara Perubahan Renja BPPKAD Kabupaten Gresik dengan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Gresik, Renstra BPPKAD Kabupaten Gresik, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan P-APBD Tahun Anggaran 2025.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan BPPKAD Kabupaten Gresik, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perubahan Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

- 1.3 Maksud dan Tujuan  
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2025
- 1.4 Sistematika Penulisan  
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2025, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I  
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah periode berjalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan perkiraan capaian dengan mengacu pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah yang sudah disahkan.
- 2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025  
Memuat Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Kebijakan/tindakan penyelesaian masalah dalam perencanaan dan penganggaran yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025  
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, jumlah anggaran, Lokasi, dan Total kebutuhan dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

## **BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI**  
**DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja BPPKAD Gresik sampai Triwulan I Tahun 2025 mengukur tingkat capaian Target Indikator Kinerja Program/Kegiatan yang telah ditetapkan selama periode berjalan Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan tingkat realisasi tersebut, dapat dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja BPPKAD Kabupaten Gresik dan implikasinya terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran. Evaluasi Renja BPPKAD Kabupaten Gresik menjadi dasar dalam menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan mengantisipasi faktor penghambat dan menangani isu – isu strategis yang akan berdampak terhadap kinerja BPPKAD Kabupaten Gresik.

Pada Tahun Anggaran 2025, BPPKAD Gresik melaksanakan sebanyak 4 (empat) program dengan anggaran sebesar Rp887.769.989.872,06 (Delapan ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah enam sen). Evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Gresik dapat dijelaskan secara detail dalam Tabel 2.1. dibawah ini :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota  
Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik  
Periode Pelaksanaan : 2025

Nama Perangkat : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggungjawab	Ket				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.
						7		8		9		10		11		12		13		14=10xI+11xII+12xIII		15=14x100				16= 8x14		17= 167x100	
05-02-01		Menyediakan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dengan Baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persentase	100%	500.883.186.216,00	25,09%	125.663.480.104,95	13,14%	65.834.939.165,80	2,51%	12.569.215.307,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2,51%	12.569.215.307,80	19,09	19,09	27,60%	138.232.695.412,75	27,60	27,60			
05.02.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen	31	974.421.285,00	24	326.320.210,00	6,00	91.386.000,00	4,00	10.845.000,00	-	-	-	-	-	4	10.845.000,00	66,67	11,87	28	337.165.210,00	90,32	34,60			
05.02.01.2.01.001			Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	68.767.551,00	6	39.280.000,00													6	39.260.000,00	100,00	57,09				
05.02.01.2.01.006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	1	35.630.713,00	2	29.463.200,00													2	29.463.200,00	200,00	82,69				
05.02.01.2.01.007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Dokumen	4	107.678.323,00	4	33.186.410,00													4	33.186.410,00	100,00	30,82				
05.02.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertindakannya Administrasi Keuangan	Bulan / Orang	24 / 120	453.752.817.962,00	24	106.331.976.250,62	120	53.291.718.525,80	120	10.990.671.767,05	-	-	-	-	-	120	10.990.671.767,05	100,00	20,62	24 / 120	117.322.648.017,67	100,00	25,86			
05.02.01.2.02.001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan	Bulan	24	123.744.509.151,00	24	106.331.976.250,62													24	106.331.976.250,62	100,00	85,93				
05.02.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	120	330.008.308.811,00	120	68.984.061.957,08	120	53.291.718.525,80	120	10.990.671.767,05						120	10.990.671.767,05	100,00	20,62	240	10.990.671.767,05	200,00	3,33			
05.02.01.2.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			400	492.041.240,00														0	#DIV/0!	#DIV/0!				
05.02.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Bulan	72	17.632.472.465,00	24	7.660.779.322,00	12	4.774.294.280,00	3	682.342.741,00						3	682.342.741,00	25,00	14,29	27	8.343.122.063,00	37,50	47,32			
05.02.01.2.06.001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Buah	3516	115.764.382,00	2658	82.162.970,00														2658	82.162.970,00	75,60	70,97			
05.02.01.2.06.002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Buah	31172	2.603.716.586,00	27288	1.885.577.721,00														27288	1.885.577.721,00	87,54	72,42			
05.02.01.2.06.003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Buah	764	546.455.267,00	1124	400.207.184,00														1124	400.207.184,00	147,12	73,24			
05.02.01.2.06.004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhiya penyediaan bahan logistik	Bulan	24	493.338.426,00	24	177.231.881,00														24	177.231.881,00	100,00	35,93			
05.02.01.2.06.005			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	Paket	12	1.315.660.636,00	15	394.093.056,00	12	255.802.300,00	3	39.719.485,00						3	39.719.485,00	25,00	15,53	18	39.719.485,00	150,00	3,02			
05.02.01.2.06.006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Jenis	10	67.228.746,00	8	22.799.990,00														8	22.799.990,00	80,00	33,91			
05.02.01.2.06.009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Kali	142	1.362.757.607,00	85	237.449.654,00														85	237.449.654,00	59,86	17,42			
05.02.01.2.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket penatausahaan arsip dinamis	Paket	2	365.468.389,00	3	393.143.585,00														3	-	150,00	0,00			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggungjawab	Ket.				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
05.02.01.2.06.011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	3.100.000.000,00	1	1.793.614.050,00	1	1.937.734.780,00			197.700.350,00					0	197.700.350,00	0,00	10,20	1	197.700.350,00	33,33	6,38			
05.02.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD OPD yang diadakan	Unit	229	1.690.776.367,00	109	884.811.000,00	19	1.170.810.000,00												109	884.811.000,00	47,60	52,33			
05.02.01.2.07.002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Unit	5	930.680.772,00	3	531.860.000,00														3	531.860.000,00	60,00	57,15			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit			19	1.170.810.000,00																				
05.02.01.2.07.003			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	224	760.095.595,00	106	352.951.000,00														106	352.951.000,00	47,32	46,44			
05.02.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	Bulan	72	5.596.624.173,00	24	5.344.688.292,00	12	3.003.173.800,00	3	590.816.155,00							3	590.816.155,00	25,00	19,67	27	5.935.504.447,00	37,50	106,06		
05.02.01.2.08.001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat	Surat	400	19.252.203,00	255	23.216.000,00														255	23.216.000,00	63,75	120,59			
05.02.01.2.08.002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Bulan	24	584.638.313,00	24	585.693.921,00														24	585.693.921,00	100,00	100,18			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	240	1.559.143.935,00	49	348.009.471,00	1	62.357.800,00	1	7.306.375,00							1	7.306.375,00	100,00	11,72	50	7.306.375,00	20,83	0,47		
05.02.01.2.08.004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan kantor	Orang	40	936.386.195,00	69	1.577.300.000,00														69	1.577.300.000,00	172,50	168,45			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	176	2.497.203.527,00	565	2.810.468.900,00	1	2.940.816.000,00	1	583.509.780,00							1	583.509.780,00	100,00	19,84	566	583.509.780,00	321,59	23,37		
05.02.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD OPD yang terpelihara	Unit	637	21.236.073.964,00	530	5.114.905.030,33	637	3.011.515.320,00	6	294.539.644,75							6	294.539.644,75	0,94	9,78	536	5.400.444.675,08	84,14	25,47		
05.02.01.2.09.002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Kendaraan	15	1.388.515.994,00	15	955.337.254,00														15	955.337.254,00	100,00	68,80			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pengapornya	Unit	16	3.702.966.846,00	32	1.178.630.477,00	16	1.413.302.520,00	4	110.968.291,00							4	110.968.291,00	25,00	7,85	36	110.968.291,00	225,00	3,00		
05.02.01.2.09.006			Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin yang dipelihara	Jenis	852	1.954.622.391,00	454	983.234.695,00														454	983.234.695,00	53,29	50,30			
			Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	48	5.212.688.901,00	24	510.033.525,00	12	293.808.600,00	1	8.563.650,00								1	8.563.650,00	8,33	2,91	25	8.563.650,00	52,08	0,16	
05.02.01.2.09.009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Gedung	2	2.431.294.507,00	2	780.593.313,00														2	780.593.313,00	100,00	32,11			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	4	6.493.902.955,00	3	707.075.766,33	1	1.304.404.200,00	1	175.007.703,75								1	175.007.703,75	100,00	13,42	4	175.007.703,75	100,00	2,69	
														Rata - rata capaian kinerja (%)		43,52	15,25	Rata - rata capaian kinerja (%)		69,89	47,86								
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Rendah								
05.02.02	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan	WTP	WTP	4.912.630.729.000,00	3.194.630.009.370,57	809.990.553.780,39	229.966.216.718,17										229.966.216.718,17	28,39		WTP	WTP	3.424.596.226.088,74	WTP	69,71			
			Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran	TEPAT	TEPAT		TEPAT															TEPAT	TEPAT		TEPAT				
5.02.02.2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	Dokumen	24		8	4													8			33,33				
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen APBD dan PAPBD yang disusun tepat waktu	Regulasi	12	14.397.134.935,00	4	3.979.764.596,00	2	2.114.501.450,00		221.599.940,00										4			33,33			
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Regulasi di bidang penganggaran yang disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku	Regulasi	12		4	2														4			33,33			
5.02.02.2.01.01			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Nota Kesepakatan yang Disusun	Dokumen	4	109.647.103,00	4	31.797.994,00														4	31.797.994,00	100,00	29,00			
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	8	292.412.590,00	4	16.990.842,00	2	48.430.150,00		360.000,00							0	360.000,00	0,00	0,74	4	360.000,00	50,00	0,12		
5.02.02.2.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Nota Kesepakatan yang Disusun	Dokumen	4	109.647.103,00	4	12.010.491,00														4	12.010.491,00	100,00	10,95			
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	8	292.412.590,00	4	9.053.050,00	2	30.393.500,00									0	-	0,00	0,00	4	-	50,00	0,00		
5.02.02.2.01.07			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun	Ranperda dan Ranperbup	4	255.843.241,00	4	78.582.285,00														4	78.582.285,00	100,00	30,72			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggungjawab	Ket.				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=10x11+12x13	15=14x100	16= 8x14	17= 16/7x100	18	19									
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati APBD yang disusun	Dokumen	8	682.296.043,00	4	43.686.564,00	2	78.347.400,00		7.663.440,00					0	7.663.440,00	0,00	9,78	4	7.663.440,00	50,00	1,12				
	5.02.02.2.01.00.08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu	Ranperda dan Ranperbup	4	255.843.241,00	4	86.239.020,00													4	86.239.020,00	100,00	33,71				
	5.02.02.2.01.00.09		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Ranperda dan Ranperbup PAPBD yang disusun	Dokumen	8	682.296.043,00	4	82.547.080,00	2	82.274.900,00	1	3.465.000,00					1	3.465.000,00	50,00	4,21	5	3.465.000,00	62,50	0,51				
	5.02.02.2.01.00.11		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah surat edaran yang disusun	Dokumen	4	292.292.275,00	4	55.055.120,00													4	55.055.120,00	100,00	18,84				
	5.02.02.2.01.00.11		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Regulasi di Bidang Anggaran yang disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Regulasi	4	779.766.907,00	2	44.148.900,00	1	88.825.100,00							0	-	0,00	0,00	2	-	50,00	0,00				
	5.02.02.2.01.00.11		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	2.902.947.260,00	15	2.227.233.500,00													15	2.227.233.500,00	125,00	76,72				
	5.02.02.2.01.00.11		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran yang disusun	Dokumen	24	7.741.730.539,00	13	1.292.419.750,00	6	1.786.230.400,00		210.111.500,00					0	210.111.500,00	0,00	11,76	13	210.111.500,00	54,17	2,71				
	5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan	Dokumen dan Laporan	85	4.120.941.048,00	13	1.478.436.420,60	12	1.490.051.455,63	3,00	203.188.097,17	-	-	-	-	3	203.188.097,17	25,00	13,64	16	1.681.624.517,77	18,82	40,81				
	5.02.02.2.02.00.01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan	Dokumen dan Laporan	6 dan 2	941.091.182,00	6 dan 2	304.084.900,00													6 dan 2	304.084.900,00	100,00	32,31				
	5.02.02.2.02.00.01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	24	2.509.750.846,00	17	1.072.094.320,60	12	1.440.051.755,63	3	198.804.097,17					3	198.804.097,17	25,00	13,81	20	198.804.097,17	83,33	7,92				
	5.02.02.2.02.00.05		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Jenis Laporan yang dihasilkan	Jenis laporan	5	182.745.044,00	5	42.770.700,00													5	42.770.700,00	100,00	23,40				
	5.02.02.2.02.00.05		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	48	487.353.976,00	24	59.486.500,00	12	49.999.700,00	3	4.384.000,00					3	4.384.000,00	25,00	8,77	27	4.384.000,00	56,25	0,90				
	5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-Jumlah Laporan Semester, LRA, Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan	28	1.450.395.163,00	22	319.794.348,00	5	125.497.800,00	2	2.160.000,00	0	-	-	-	2	2.160.000,00	40,00	1,72	24	321.954.348,00	85,71	22,20				
	5.02.02.2.03.00.04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis laporan yang disusun	Laporan	4	123.343.854,00	5	49.372.350,00													5	49.372.350,00	125,00	40,03				
	5.02.02.2.03.00.04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	20	328.939.796,00	10	69.884.500,00	5	125.497.800,00	2	2.160.000,00					2	2.160.000,00	40,00	1,72	12	2.160.000,00	60,00	0,66				
	5.02.02.2.03.00.11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang dihasilkan	Ranperda dan Ranperbup	4	272.198.477,00	4	168.057.498,00													4	168.057.498,00	100,00	61,74				
	5.02.02.2.03.00.11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	280	725.913.036,00	3	32.480.000,00													3	-	1,07	0,00				
	5.02.02.2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertindakannya Pencairan Dana Keuangan	Bulan	72	4.892.662.257.854,00	24	3.188.852.014.005,97	12	806.260.503.074,76		229.539.268.681,00									24	3.418.391.282.686,97	33,33	69,87				
	5.02.02.2.04.00.08		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang Penyaluran BK khusus	Persentase	100	1.132.965.589.140,00	99,83	1.513.589.652.700,00														99,825	1.513.589.652.700,00	99,83	133,60			
	5.02.02.2.04.00.08		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	4	3.021.451.482.542,00	4	1.347.394.369.791,00	3	665.165.534.180,00		229.539.268.681,00					-	229.539.268.681,00	0,00	34,51	4	229.539.268.681,00	100,00	7,60				
	5.02.02.2.04.00.09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terpenuhnya kebutuhan dana darurat daerah	Persentase	100	44.460.967.514,00	53,30	32.508.852.672,59														53,3	32.508.852.672,59	53,30	73,12			
	5.02.02.2.04.00.09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	4	118.570.817.594,00	2	3.209.383.335,38	1	20.000.000.000,00												2	-	50,00	0,00			
	5.02.02.2.04.00.10		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang menerima dana bagi hasil	Bulan	24	156.868.455.567,00	24	81.183.661.057,00														24	81.183.661.057,00	100,00	51,75			
	5.02.02.2.04.00.10		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	4	418.344.945.497,00	2	210.966.094.450,00	1	121.094.968.894,76												2	-	50,00	0,00			
																Rata - rata capaian kinerja (%)		16,25	13,58	Rata - rata capaian kinerja (%)		42,80	40,51						
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggungjawab	Ket				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10+11+12+13	15=14/3x100	16=8+14	17=16/7x100	18	19										
05.02.03		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	Persentase	100%	17.225.854.998,00	45,03%	7.757.372.419,00	13,86%	2.386.923.487,00	0,74%	127.738.600,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,74%	127.738.600,00	5,35	5,35	45,77%	7.885.111.019,00	45,77	45,77		
05.02.03.2.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tercatat	Unit	2.647.482	17.225.854.998,00	876.359	7.757.372.419,00	438.737	2.386.923.487,00	71,00	127.738.600,00	-	-	-	-	-	71	127.738.600,00	0,02	5,35	876.430	7.885.111.019,00	33,10	45,77			
05.02.03.2.01.0002			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	625.208.738,00	2	649.044.750,00													2	649.044.750,00	100,00	103,81				
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar BMD yang disusun	Dokumen	4	1.667.339.044,00	2	761.104.125,00	1	299.998.900,00								-	0,00	0,00	2	-	50,00	0,00				
05.02.03.2.01.0005			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang diurus pembayaran PKB nya; Jumlah Laporan yang disusun	R2 dan R4; Laporan	1050 dan 350; 2	1.635.987.209,00	648 dan 377; 2	1.065.546.270,00													648 dan 377; 2	1.065.546.270,00	89,80	65,13				
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	192	4.381.215.033,00	96	408.758.064,00	48	549.999.400,00		10.966.000,00						-	10.966.000,00	0,00	1,99	96	10.966.000,00	50,00	0,25			
05.02.03.2.01.0006			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang diinventarisasi	R2 dan R4	4572 dan 186	6.854.379,00	7.063.000,00														-	7.063.000,00	-	103,04				
05.02.03.2.01.0007			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diperbaiki administrasinya	Unit	4250	2.089.470.548,00	3828	2.805.545.050,00													3828	2.805.545.050,00	90,07	134,27				
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1200	5.572.308.274,00	1121	1.718.849.810,00	500	1.364.544.386,00	40	101.085.600,00						40	101.085.600,00	8,00	7,41	1.161	101.085.600,00	96,75	1,81			
05.02.03.2.01.0008			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dinilai	Unit	120	90.336.436,00	110	104.156.250,00														110	104.156.250,00	91,67	115,30			
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	100	240.914.887,00	49	125.518.000,00	25	125.640.638,00	29	14.112.000,00						29	14.112.000,00	116,00	11,23	78	14.112.000,00	78,00	5,86			
05.02.03.2.01.0009			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Koordinasi dalam rangka pengawasan & pengendalian BMD	Kali	50	92.048.759,00	18	6.355.000,00										-			18	6.355.000,00	36,00	6,90				
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	176	245.480.398,00	1	14.160.500,00	44	15.010.000,00								-	0,00	0,00	1	-	0,57	0,00				
05.02.03.2.01.0010			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dipindahtanganan dan Jumlah BMD yang dihapus	Unit dipelihara dan Unit dihapus	185	157.816.930,00	100	43.721.500,00													100	43.721.500,00	54,05	27,70				
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	40	420.874.363,00	27	47.550.100,00	10	31.730.163,00	2	1.575.000,00						2	1.575.000,00	20,00	4,96	29	1.575.000,00	72,50	0,37			
																Rata - rata capaian kinerja (%)		0,02	5,35	Rata - rata capaian kinerja (%)		33,10	45,77						
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
05.02.04		Meningkatnya Pendapatan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas pendapatan daerah	Persentase	100%	38.935.449.169,00	55,31%	21.535.845.245,00	100,00%	9.556.573.438,87	1,70%	661.273.556,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1,70%	661.273.556,00	6,92	6,92	57,01%	22.197.118.801,00	57,01	57,01			
				Rasio Kemandirian Fiskal	Persentase	100%		66%		68%		4,71%		0,00%	0,00%	0,00%		4,71%			6,92	70,71%		22.197.118.801,00	70,71	57,01			
5.02.04.2.01			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	- Prosentase Capaian Target Pendapatan PBB & BPHTB	Persentase	100%		55,31%	24,54%		1,70%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	1,70%			6,92	57,01%		57,01	57,01				
				- Prosentase Capaian Target pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Persentase	100%	38.935.449.169,00	55,31%	21.535.845.245,00	24,54%	9.556.573.438,87	1,70%	661.273.556,00	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	1,70%	661.273.556,00	6,92	6,92	57,01%	22.197.118.801,00	57,01	57,01			
				- Prosentase Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah	Persentase	100%		55,31%	24,54%		1,70%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%		1,70%			6,92	57,01%		57,01	57,01			
5.02.04.2.01.0001			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang ditetapkan	Jenis	6	281.389.212,00	3	320.013.532,00													3	320.013.532,00	50,00	113,73				
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	12	750.423.460,00	3	175.164.900,00	3	555.968.000,00	1	42.846.000,00						1	42.846.000,00	33,33	7,71	4	42.846.000,00	33,33	5,71			
5.02.04.2.01.0002			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang dibangun dan Aplikasi yang dipelihara	6 dan 8	1.950.582.868,00	1 dan 7	1.564.610.480,00														1 dan 7	1.564.610.480,00	57,14	80,21				
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	24	5.201.916.358,00	15	694.772.700,00	6	120.910.000,00	1	3.063.000,00						1	3.063.000,00	16,67	2,53	16	3.063.000,00	66,67	0,06			
5.02.04.2.01.0003			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta yang diberi penyuluhan	Orang	900	1.108.828.048,00	776	571.195.530,00													776	571.195.530,00	86,22	51,51				
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	40	1.755.454.624,00	20	392.801.910,00	10	1.296.880.641,54	1	30.195.500,00						1	30.195.500,00	10,00	2,33	21	30.195.500,00	52,50	1,72			
5.02.04.2.01.0005			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah SPTPD yang didata	Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah	21600	173.973.400,00	31153	182.821.006,00													31153	182.821.006,00	144,23	105,09				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggungjawab	Kategori															
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.											
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=14x100	16=8+14	17=16x100	18	19																						
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	463.961.358,00	5	125.915.569,00	1	310.318.300,00	1	13.500.500,00					1	13.500.500,00	100,00	4,35	6	13.500.500,00	150,00	2,91															
5.02.04.2.01.00.06			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah OP yang dikelola	Objek Pajak	20000	1.018.968.097,00	36120	781.952.500,00													36120	781.952.500,00	180,60	76,74															
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	8	3.474.927.260,00	7	300.724.000,00	2	791.450.000,00	1						1	-	50,00	0,00	8	-	100,00	0,00															
5.02.04.2.01.00.07			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian dan pemeriksaan serta penerima hibah	Objek Pajak : Lembaga	40; 92	4.812.805.088,00	72; 60	6.923.701.650,00													72; 60	6.923.701.650,00	115,07	143,86															
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	200	12.743.326.703,00	105	931.951.982,00	50	819.168.000,00	10	49.600.556					10	49.600.556,00	20,00	6,05	115	49.600.556,00	57,50	0,39															
5.02.04.2.01.00.08			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SKPD yang ditetapkan	Surat Ketetapan Pajak Daerah	8000	156.064.008,00	16607	128.451.999,00													16607	128.451.999,00	207,59	82,31															
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	8	416.199.655,00	6	170.134.825,00	2	154.447.745,00							-	-	0,00	0,00	6	-	75,00	0,00															
5.02.04.2.01.00.09			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terpenuhinya pelayanan selama 1 tahun	Bulan	12	111.700.160,00	12	102.320.000,00													12	102.320.000,00	100,00	91,60															
5.02.04.2.01.00.11			Penagihan Pajak Daerah	Persentase capaian target terhadap tunjukkan potensi	Persentase	55	1.061.694.467,00	28,5	1.436.803.631,00														28,5	1.436.803.631,00	51,82	135,33														
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan PenagihanPajak Daerah	Dokumen	32	2.831.382.304,00	72	3.083.114.450,00	8	3.247.950.352,33	2	83.970.000,00					2	83.970.000,00	25,00	2,59	74	83.970.000,00	231,25	2,97															
5.02.04.2.01.00.13			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah WP yang di periksa dan dilakukan pengawasan	Wajib Pajak	1600	169.587.516,00	765	574.915.101,00														765	574.915.101,00	47,81	338,01														
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	32	452.264.583,00	10	3.074.479.480,00	8	2.259.480.400,00	2	438.098.000,00					2	438.098.000,00	25,00	19,39	12	438.098.000,00	37,50	96,87															
														Rata - rata capaian kinerja (%)		6,92	6,92	Rata - rata capaian kinerja (%)		57,01	57,01																			
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Predikat Kinerja		Rendah	Rendah																			
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>																																								
<b>TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)</b>																																								
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>																																								
																</																								

Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BPPKAD Kabupaten Gresik, secara umum telah menunjukkan konsistensi antara dokumen rencana kerja dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa program yang terkendala karena adanya kebijakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD dan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2025 Tentang Penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah. Adanya kebijakan tersebut mengakibatkan munculnya keraguan dalam menjalankan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sehingga beberapa program mengalami keterlambatan.

Adapun capaian target realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Pada Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp65.834.939.165,80, dengan realisasi sebesar Rp12.569.215.307,80 atau 19,09% dari total anggaran. Capaian program diukur melalui indikator persentase ketercapaian sasaran program pada perangkat daerah, yang hingga triwulan tersebut terealisasi sebesar 19,09%.

**II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah,**

Pada Triwulan I Tahun 2025, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp809.990.553.780,39, dengan realisasi mencapai Rp229.966.216.718,17 atau sebesar 28,39%. Indikator kinerja program meliputi:

- a. Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan, dengan capaian WTP;
- b. Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen penganggaran, dengan capaian tepat waktu.

### III. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah,**

Pada Triwulan I Tahun 2025, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.386.923.487,00, dengan realisasi sebesar Rp127.738.600,00 atau 5,35%. Indikator kinerja program diukur melalui persentase barang milik daerah yang telah tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset, dengan capaian sebesar 5,35%.

### IV. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah,**

Pada Triwulan I Tahun 2025, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.556.573.438,87, dengan realisasi sebesar Rp661.273.556,00 atau 6,92%.

Indikator kinerja program mencakup:

- a. Tingkat efektivitas pendapatan daerah, dengan capaian sebesar 6,92%;
- b. Rasio kemandirian fiskal, dengan capaian sebesar 6,92%

## 2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPPKAD Kabupaten Gresik menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi kinerja badan. Adapun permasalahan dan hambatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemutakhiran dan pemanfaatan data potensi pajak daerah sebagai dasar perencanaan dan penagihan;
2. Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran operasional untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan secara optimal;
3. Monitoring, evaluasi dan pengawasan kinerja pemungutan pajak serta kinerja kegiatan perangkat daerah yang belum optimal;
4. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak daerah dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu;
5. Perubahan kebijakan atau penyesuaian prioritas yang menyebabkan adanya kegiatan yang tertunda atau dibatalkan;

6. Ketidaksiapan lokasi atau objek pelaksanaan kegiatan, terutama dalam hal pengamanan aset daerah, yang mengalami hambatan karena proses sertifikasi aset tanah yang kompleks dan memerlukan waktu serta koordinasi lintas sektor;
7. Aplikasi dari Pemerintah Pusat (SIPD) sering mengalami trouble, terutama pada jam-jam kerja serta respon pengaduan sangat lambat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam Renja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan edukatif, digitalisasi, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum.
2. Penguatan sistem perencanaan dan pengendalian belanja agar lebih responsif terhadap dinamika pelaksanaan dan perubahan regulasi.
3. Percepatan proses sertifikasi aset daerah melalui kerja sama lintas perangkat daerah dan koordinasi intensif dengan instansi vertikal seperti BPN.
4. Pengembangan kapasitas kelembagaan, SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BPPKAD Kabupaten Gresik

Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 menjabarkan secara terinci perubahan rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan, arah prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan pada Perubahan RKPD Kabupaten Gresik, serta capaian kinerja yang direncanakan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Gresik pada Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 telah disusun pada Tabel 3.1. sebagai berikut.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KAB. GRESIK  
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		<b>BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>								706.272.340.427,00	887.768.989.872,06	900.544.999.521,63	194.272.659.094,63							0,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							706.272.340.427,00	887.768.989.872,06	900.544.999.521,63	194.272.659.094,63							0,00		
	5.02	KEUANGAN							706.272.340.427,00	887.768.989.872,06	900.544.999.521,63	194.272.659.094,63							0,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	53.337.181.770,00	65.834.939.165,80	71.028.289.707,80	-53.337.181.770,00							0,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	87.576.117,00	91.386.000,00	77.253.500,00	-10.322.617,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	66.172.264,00	65.600.400,00	59.810.400,00	-6.361.864,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kembangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	21.403.853,00	25.785.600,00	17.443.100,00	-3.960.753,00	Kab. Gresik, Dahanrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	46.059.894.709,00	53.291.718.525,80	53.291.718.525,80	7.231.823.816,80			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	46.059.894.709,00	53.291.718.525,80	53.291.718.525,80	7.231.823.816,80	Kab. Gresik, Kebomas, Kembangan	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	492.041.240,00	6.079.669.240,00	6.079.669.240,00			-	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				-	400 Orang	0,00	492.041.240,00	6.079.669.240,00	6.079.669.240,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.812.973.694,00	4.774.294.280,00	4.394.149.322,00	581.175.628,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	36.691.000,00	36.691.000,00	36.691.000,00	0,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	321.610.350,00	1.136.448.100,00	1.218.911.800,00	897.301.450,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebangan	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				9 Paket	9 Paket	271.766.810,00	271.766.800,00	280.189.300,00	8.422.490,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	255.802.586,00	255.802.300,00	255.802.300,00	-286,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kembangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	821.863.175,00	821.863.400,00	692.666.200,00	-129.196.975,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kembangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.370.443,00	13.370.400,00	13.370.400,00	-43,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kembangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19 Laporan	19 Laporan	300.617.500,00	300.617.500,00	161.692.000,00	-138.925.500,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kembangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.791.251.830,00	1.937.734.780,00	1.734.826.322,00	-56.425.508,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kembangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	1.170.810.000,00	1.170.810.000,00	1.170.810.000,00			-	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				-	19 Unit	0,00	1.170.810.000,00	1.170.810.000,00	1.170.810.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.592.952.000,00	3.003.173.800,00	3.003.173.800,00	1.410.221.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	62.358.000,00	62.357.800,00	62.357.800,00	-200,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.530.594.000,00	2.940.816.000,00	2.940.816.000,00	1.410.222.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebangan	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.783.785.250,00	3.011.515.320,00	3.011.515.320,00	1.227.730.070,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya</i>				16 Unit	16 Unit	971.357.000,00	1.413.302.520,00	1.413.302.520,00	441.945.520,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebangan	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	191.906.750,00	293.808.600,00	293.808.600,00	101.901.850,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kembangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	620.521.500,00	1.304.404.200,00	1.304.404.200,00	683.882.700,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kembangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-				-	-	644.125.632.431,00	809.990.553.780,39	819.275.261.136,04	-644.125.632.431,00							0,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	2.114.501.450,00	2.114.501.450,00	1.272.110.400,00	-842.391.050,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	48.430.150,00	48.430.150,00	24.428.500,00	-24.001.650,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	30.393.500,00	30.393.500,00	13.227.500,00	-17.166.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	78.347.400,00	78.347.400,00	43.546.000,00	-34.801.400,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	82.274.900,00	82.274.900,00	68.626.900,00	-13.648.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	88.825.100,00	88.825.100,00	27.016.100,00	-61.809.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	1.786.230.400,00	1.786.230.400,00	1.095.265.400,00	-690.965.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	769.999.372,00	1.490.051.455,63	1.032.320.783,63	262.321.411,63			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	719.999.672,00	1.440.051.755,63	1.009.343.683,63	289.344.011,63	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	49.999.700,00	49.999.700,00	22.977.100,00	-27.022.600,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	125.498.125,00	125.497.800,00	48.432.800,00	-77.065.325,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi	-		0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				5 Laporan	5 Laporan	125.498.125,00	125.497.800,00	48.432.800,00	-77.065.325,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	641.115.633.484,00	806.260.503.074,76	816.922.397.152,41	175.806.763.668,41				Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>				3 Laporan	3 Laporan	485.084.667.000,00	665.165.534.180,00	665.465.534.180,00	180.380.867.180,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA		Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00	23.753.228.519,12	-6.246.771.480,88	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	126.030.966.484,00	121.094.968.894,76	127.703.634.453,29	1.672.667.969,29	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA		Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-				-	-	2.386.923.977,00	2.386.923.487,00	1.820.499.272,00	-2.386.923.977,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	2.386.923.977,00	2.386.923.487,00	1.820.499.272,00	-566.424.705,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	299.999.040,00	299.998.900,00	274.303.000,00	-25.696.040,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				48 Laporan	48 Laporan	549.999.750,00	549.999.400,00	324.355.000,00	-225.644.750,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				300 Laporan	500 Laporan	1.424.544.386,00	1.364.544.386,00	1.114.603.600,00	-309.940.786,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				25 Laporan	25 Laporan	65.640.638,00	125.640.638,00	88.832.294,00	23.191.656,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				44 Laporan	44 Laporan	15.010.000,00	15.010.000,00	5.542.000,00	-9.468.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsuahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	31.730.163,00	31.730.163,00	12.863.378,00	-18.866.785,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	6.422.602.249,00	9.556.573.438,87	8.420.949.405,79	-6.422.602.249,00							0,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	6.422.602.249,00	9.556.573.438,87	8.420.949.405,79	1.998.347.156,79			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	310.340.000,00	555.968.000,00	409.253.400,00	98.913.400,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	120.910.000,00	120.910.000,00	46.874.000,00	-74.036.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				10 Laporan	10 Laporan	449.834.250,00	1.296.880.641,54	1.075.079.091,54	625.244.841,54	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	120.794.300,00	310.318.300,00	219.325.500,00	98.531.200,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>				2 Laporan	2 Laporan	550.000.000,00	791.450.000,00	615.082.900,00	65.082.900,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>				50 Obyek Pajak	50 Obyek Pajak	819.168.000,00	819.168.000,00	655.397.421,00	-163.770.579,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	133.447.745,00	154.447.745,00	113.750.220,00	-19.697.525,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>				8 Dokumen	8 Dokumen	2.168.260.354,00	3.247.950.352,33	3.150.820.473,25	982.560.119,25	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>				8 Dokumen	8 Dokumen	1.749.847.600,00	2.259.480.400,00	2.135.366.400,00	385.518.800,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi			0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>J U M L A H</b>									<b>706.272.340.427,00</b>	<b>887.768.989.872,06</b>	<b>900.544.999.521,63</b>	<b>305.412.754.162,45</b>							<b>0,00</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Renja BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan BPPKAD Kabupaten Gresik sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2025 dan penyesuaian arah kebijakan serta prioritas pembangunan sesuai Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025. Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025 akan menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2025 secara terukur, efektif, dan efisien.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang – undangan secara terintegrasi, sinergis, dan sejalan dengan tugas dan fungsi BPPKAD Gresik, baik pada lingkup internal maupun eksternal antar Instansi/Lembaga/Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Perubahan Renja BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 akan menjadi acuan dalam perubahan perencanaan dan penganggaran sesuai strategi dan arah kebijakan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025, yang akan ditindaklanjuti dalam penyusunan Perubahan KUA & PPAS hingga ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.